

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Pada saat ini Hubungan Internasional menjadi disiplin ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, maka terdapat beberapa pemikiran atau teori yang mendeskripsikan Ilmu Hubungan Internasional atau Kerjasama Internasional sebagai sebuah kajian ilmu pengetahuan yang sebaiknya dipelajari. Menurut Perwita & Yani dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

“Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interpendensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (A.A, 2005).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Terdapat alasan kuat yang diutarakan oleh Jackson dan Sorensen mengapa kita sebaiknya mempelajari Hubungan Internasional dengan ungkapan sebagai berikut:

“Adanya faktor bahwa seluruh penduduk dunia terbagi dalam komunitas politik yang terpisah, atau Negara – Negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama – sama Negara negara tersebut membentuk system internasional yang akhirnya menjadi sistem global. (Jackson, 1999).

Hubungan internasional memiliki keterkaitan dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu hubungan internasional, yang juga meliputi kajian ilmu politik luar negeri atau politik internasional, serta semua segi hubungan diantara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi serta nilai-nilai dan etika internasional. Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (state-actor) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (non- state). interaksi antara aktor negara (state actor) dalam penelitian ini adalah Arab Saudi dan Yaman.

2.1.2 Konflik

Isu konflik tengah menjadi suatu isu global dimana hal ini menyangkut dengan keamanan dan stabilitas dari negara, baik konflik yang terjadi di internal negara maupun konflik yang terjadi antar negara. Meskipun dua perang dunia telah berakhir, bukan berarti tidak ada konflik yang terjadi di antara negara satu dengan negara lainnya. Konflik dapat

timbul disebabkan suatu pemerintah

Menyelesaikan masalah dengan cara yang bertentangan denganyang dikehendaki negara lain. Sumber-sumber konflik dapat berupa persoalan ekonomi, geografis, sosial budaya dan politik identitas. Konflik merupakan perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, dan bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak dalam kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum yang merupakan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai di mana dalam memperjuangkannya terjadi (wahyudi).

Menurut Stefan Wolff, konflik sebagai fenomena sosial dari persaingan antar aktor dengan tujuan yang tidak kompatibel, yang sama tuanya dengan peradaban manusia (Wolff, 2006).

Menurut Holsti, konflik pada umumnya disebabkan pertentangan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu misalnya perluasan atau mempertahankan wilayah territorial, keamanan, jalur kemudahan kearah daerah pemasaran, prestise, persekutuan, penggulingan pemerintahan negara yang tidak bersahabat. Dalam rangka usaha mempertahankan dana tau mencapai tujuan tersebut, tuntutan atau 34 tindakan atau kedua-dua nya berlangsung dan bertentangan dengan kepentingan serta tujuan negara lain nya (Sitepu, 2009 : 361).

Konflik sebagai akibat dari menjamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi (Hidayat, 2002:124).

Perbedaan pendapat dan tujuan yang mengakibatkan konflik terjadi antara pemerintah resmi Yaman dan Kelompok Houthi, begitu pula Arab Saudi yang menjadi koalisi pemerintahan resmi Yaman untuk membantu menyelesaikan konflik ini.

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh K.J Holsti. Dalam teorinya, kebijakan luar negeri merupakan suatu ide serta gagasan dalam membentuk suatu rumusan dengan tujuan untuk memecahkan adanya suatu permasalahan maupun bertujuan untuk

melakukan perubahan – perubahan dalam suatu wilayah. Adanya perbedaan-perbedaan tujuan maupun perbedaan kebijakan setiap negara, dengan adanya kebijakan luar negeri setiap negara harus menyamakan dan memiliki kesepahaman dalam melakukan kerjasama, hal ini dilakukan untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan pribadi maupun kepentingan kolektif. Kebijakan luar negeri merupakan salah satu langkah yang dilakukan setiap negara, untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mempengaruhi negara lain, mendapatkan prestis serta bertujuan untuk menjaga keamanan bersama. Dalam teori kebijakan luar negeri terdapat tiga rumusan yang menjadi tujuan dari adanya suatu negara untuk membentuk maupun melakukan kebijakan luar negeri, diantaranya;

1. Nilai, pada tujuan suatu negara merupakan salah satu faktor penting dari adanya dorongan untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Hal ini karena, kebijakan luar negeri dirumuskan dan dilaksanakan dengan berdasarkan pada tujuan suatu negara.
2. Unsur waktu, dalam melakukan kebijakan luar negeri terdapat unsur waktu yang targetnya harus terpenuhi dalam melakukan pencapaian tujuan.
3. Jenis tuntutan tujuan, merupakan salah satu tuntutan yang harus dijalankan oleh negara anggota dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. (K.J Holsti.1983)
4. Dalam kapabilitasnya merancang maupun melaksanakan setiap kebijakan luar negeri, negara memiliki dasar serta rangkaian –

rangkaian asumsi maupun tujuan-tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keamanan skala nasional.

Sedangkan komponen yang dipakai dalam kebijakan luar negeri adalah adanya pandangan, sikap yang dilakukan atau dimiliki oleh negara lain, keputusan- keputusan dan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai. (Holsti, 1983).

Kebijakan luar negeri dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan melakukan peperangan, kerjasama perekonomian dan perdamaian. Dari adanya 3 cara tersebut, Arab Saudi memilih untuk melakukan upaya peperangan dengan cara melakukan Intervensi dan intervensi yang dilakukan ialah intervensi militer

2.1.3.1 Intervensi Militer

Intervensi dapat dikatakan sebagai campur tangan negara diktator dalam urusan negara lain. Namun, intervensi juga dapat berupa turut campurnya suatu pihak untuk membantu penyelesaian masalah pihak lainnya. Tidak selalu mengarah pada konotasi negatif yang ingin mengambil keuntungan dalam perselisihan.

Menurut pandangan J.G Starke Intervensi adalah suatu bentuk propaganda atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di negara lain.

Konsep hegemoni juga dipopulerkan oleh Dr.Wirjono Prodojickro ia menganggap bahwa intervensi adalah suatu campur tangan negara asing

yang sifatnya menekan dengan alat kekerasan atau dengan ancaman melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi. Disisi yang sama Parry and Granberpendapat bahwa intervensi adalah tindakan turut campurnya sebuah negara secara diktator terhadap negara lain yang tujuannya untuk menjaga ataupun mengubah kondisi aktual tertentu.

Intervensi eksternal juga adalah campur tangan suatu negara pada konflik antardua negara lainnya. Intervensi eksternal dapat bertujuan mendamaikan atau menyelesaikan konflik antardua negara, maupun mendukung salah satu negara agar dapat menang dari negara lainnya. Tidak hanya antarnegara, intervensi eksternal juga dapat terjadi pada hubungan multilateral (banyak negara).

Dalam politik internasional dikenal suatu intervensi. Intervensi merupakan tindakan campurtangan dari negara luar dalam berbagai bidang yaitu ekonomi, politik, maupun militer terhadap urusan dalam negeri negara lain. Intervensi juga dimaksudkan untuk membantu mengatasi suatu konflik baik konflik nasional maupun konflik internasional. Adapun bentuk intervensi ada dua yaitu :

- a. Intervensi militer, ada beberapa bentuk intervensi meliputi aksi tunggal dari pemerintah individu, koalisi khusus yang berkepentingan, atau pasukan perdamaian yang dipimpin oleh organisasi keamanan regional.
- b. Intervensi diplomatik, yaitu penyelesaian konflik dengan cara perundingan dengan pihak yang berkonflik (Marbun, 2003 : 233)

Berdasarkan jenis intervensi yang sudah dijelaskan, intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah Intervensi Militer karena Arab Saudi mengerahkan 150 pesawat tempur dan 150 ribu tentara untuk operasi militer ini.

2.1.4 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para pemerhati internasional menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup Dalam politik internasional. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (A.A, 2005).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara, Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu kekuatan yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negrinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2009: 163). Hal itu mengartikan bahwa, masalah-masalah tersebut dapat mengemuka menjadi masalah politik luar negeri apabila kekuatan nasional negara- negara yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya.

Menurut John J Mearsheimer, Untuk mencapai kekuatan besar, Arab Saudi harus dapat mencapai tiga obyektif. Obyektif yang pertama adalah regional hegemony yang adalah mencegah kekuatan besar lainnya dalam mencapai hegemon atau mencari cara agar adanya balance of power di wilayah tersebut. Arab Saudi ingin menjaga posisinya agar negara ini tetap menjadi hegemoni di Timur Tengah dikarenakan adanya kekuatan Iran dalam konflik Yaman sebagai bantuan bagi kelompok pemberontak Houthi. Kedua, Maximum Wealth yang adalah negara harus kuat secara ekonomi. Artinya untuk dapat memiliki persenjataan yang paling canggih harus

diikuti dengan ekonomi yang baik agar dapat mendapatkan kualitas persenjataan yang paling tinggi. Ketiga, *balance of land power* yang adalah Arab Saudi harus dapat membangun kekuatan yang kuat dari segala aspek militer seperti udara, air, laut.

2.1.5 Keamanan Internasional

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu hal yang membahayakan eksistensi dan mengganggu kesejahteraan hidup bangsa dan negara, maka hal tersebut akan dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap masalah keamanan nasional negara tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin dalam buku “Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia”, yaitu:

“Bahwa pembinaan pertahanan negara dapat dilakukan dengan konsep *Preventive defense* yakni strategi pertahanan yang mengonsentrasikan keamanan nasional pada berbagai macam potensi ancaman, meskipun ancaman tersebut bersifat kecil, namun jika tidak dikelola secara tepat maka ancaman tersebut akan menjadi bahaya yang konkrit yang secara langsung akan mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara” (Muhaimin, 2006:23).

Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Buzan dalam buku “*People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*”, bahwa:

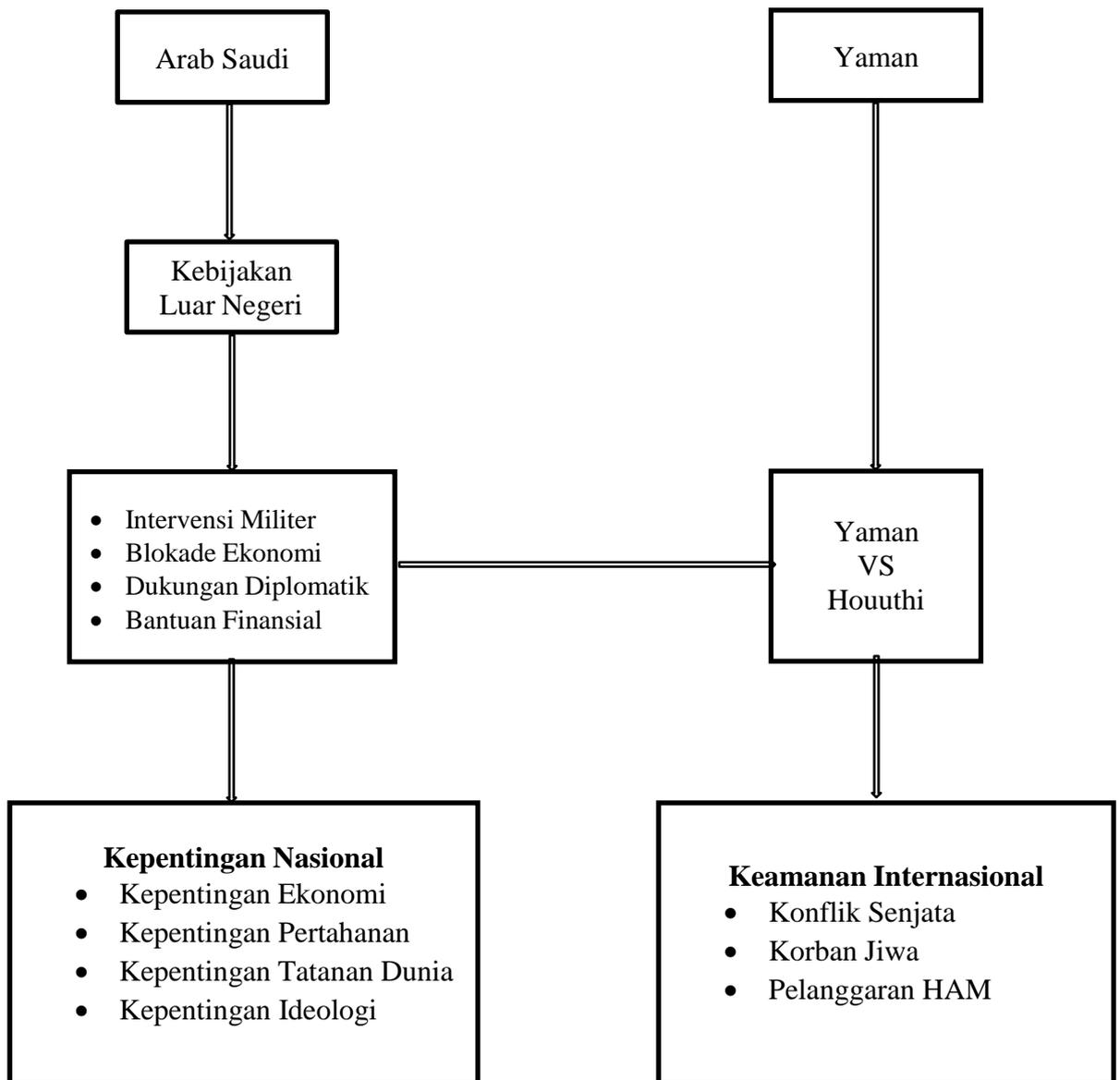
“Keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit keamanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda” (Buzan dalam (A.A, 2005)

Konflik ini tentu saja mengancam keamanan internasional karena mengakibatkan ribuan nyawa hilang dan juga terjadinya perang senjata yang terjadi di Yaman dan beberapa warga sipil kehilangan tempat tinggal nya serta terjadinya krisis kemanusiaan. Keamanan internasional ada karena meupakan dari keamanan nasional, dimana keamanan nasional adalah hal yang penting untuk keberlangsungan kedaulatan negara. (Putri S. O., 2021)

2.2 Kerangka Pemikiran

Interaksi lintas batas aktor negara yang terjadi antara Arab Saudi dan Yaman termasuk dalam Hubungan Internasional karena interaksi antar aktor negara ini telah melewati batas nasional dan terjadi didalam dunia internasional, konflik antara Yaman dan Arab Saudi ini menjadi sangat rumit karena telah melibatkan negara negara koalisi yang ada di Timur Tengah. Kebijakan luar negeri yang diambil oleh Arab Saudi ialah melakukan Intervensi. Intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah intervensi militer karena Arab Saudi mengerahkan 150 pesawat tempur dan 150 ribu tentara untuk operasi militer ini, terjadinya Intervensi Militer tersebut

merupakan permintaan bantuan dari pemerintahan Yaman kepada Arab Saudi karena pemerintah Yaman meyakini bahwa Arab Saudi mempunyai power yang sangat besar di kawasan Timur Tengah. Intervensi ini mengakibatkan ribuan nyawa hilang dan juga terjadinya perang senjata yang terjadi di Yaman dan beberapa warga sipil kehilangan tempat tinggal serta terjadinya krisis kemanusiaan dan tentunya mengancam Keamanan Internasional di negara yang sedang berkonflik. Intervensi yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari Kepentingan Nasional oleh Arab Saudi salahsatunya yakni Arab Saudi ingin menjadi negara Hegemoni di kawasan Timur Tengah.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran